

# BERKALA ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI

VOL 1, NO. 3, MEI 2012

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SIKLUS PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN KAS (STUDI KASUS PADA *RETAILER* SEPATU CABANG NGANJUK)  
Ristra Ika Intan Prawesty

PERANAN *INTERNAL AUDITOR* DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN KECURANGAN  
Soeharmoro

SIKAP PROFESIONALISME DAN KODE ETIK AUDITOR INTERNAL  
Cecylia Dewi Sinniarito Wongso

PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL DAN PERANNYA DALAM PENGUNGKAPAN TEMUAN AUDIT  
Yeni Siswati

EVALUASI KEPATUHAN PERPAJAKAN DAN UPAYA *TAX PLANNING* UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN PT XYZ  
Albert Bintoro Putro

PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, PERJANJIAN HUTANG, DAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI  
Rehobot Tanomi

KEMAMPUAN LABA BERSIH, ARUS KAS OPERASI, DAN RASIO PIUTANG UNTUK MEMPENGARUHI ARUS KAS MASA MENDATANG PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGE* DI BEI  
Ferra Kusuma Purbo Wanti

EKSPEKTASI KLIEN DALAM KEBIJAKAN AUDIT  
Ade Kartika Sari

PENTINGNYA *RED FLAG* BAGI AUDITOR INDEPENDEN UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN  
Fanny Novian Tedjasukma

PENGUNAAN INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DALAM INTENSITAS PERSAINGAN PASAR UNTUK PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN  
Hario Widodo

*TAX AUDIT* GUNA MENDETEKSI KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK AKIBAT *SELF ASSESSMENT SYSTEM*  
Thea Indrayani

KUALITAS SISTEM INFORMASI, KUALITAS INFORMASI, DAN *PERCEIVED USEFULNESS* TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI *SOFTWARE* AKUNTANSI  
Venia Agustines Tananjaya

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
Hendra Ronaldi

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PT TDMN  
Jevon Tanugraha

PENGARUH ASIMETRI INFORMASI TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI  
Youngkie Santoso

PERANAN PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN (STUDI PRAKTIK KERJA PADA KOPERASI KARAYAWAN SAMPOERNA)  
Soegiono

PERAN PENGENDALIAN INTERNAL PADA AUDIT SISTEM INFORMASI DALAM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERKOMPUTERISASI  
Yulia Anarta Yasmita

PENGARUH RASIO PROFITABILITAS TERHADAP KESEHATAN PERMODALAN BANK SWASTA NASIONAL DI BEI  
Enny Evelina

ANALISIS *CORPORATE GOVERNANCE* DAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI KESULITAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI  
Sani Eka Sulityo Ningsih

ANALISIS PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI  
Elizabeth Meilyana

EVALUASI EFEKTIVITAS FUNGSI SATUAN PENGAWASAN INTERN (STUDI PADA PERUSAHAAN BUMN)  
Yudhi Ardianto T.

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS  
UNIKA WIDYA MANDALA SURABAYA



**Editorial Staff**  
**BERKALA ILMIAH MAHASISWA AKUNTANSI**  
**FAKULTAS BISNIS**  
**UNIKA WIDYA MANDALA**



**Ketua Redaksi**

Yohanes Harimurti, SE, MSi, Ak  
(Ketua Jurusan Akuntansi)

**Mitra Bestari**

Lindrawati, SKom, SE, MSi

J. C. Shanti, SE, MSi, Ak

C. Bintang Hari Yudhanti, SE, MSi

Teodora Winda Mulia, SE, MSi

Marini Purwanto, SE, MSi, Ak

Irene Natalia, SE, MSc, Ak

B

I

M

A

**Staf Tata Usaha**

Karin

Andreas Tuwo

Agus Purwanto

**Alamat Redaksi**

Fakultas Bisnis - Jurusan Akuntansi  
Gedung Benediktus, Unika Widya Mandala  
Jl. Dinoyo no. 42-44, Surabaya  
Telp. (031) 5678478, ext. 122

## EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA PT TDMN

JEVON TANUGRAHA

gviigjevontanugraha@yahoo.com

### ABSTRACT

*“Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)” is determined by the Accounting Association of Indonesia (IAI) to facilitate small and medium enterprises. PT. TDMN is a “Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)” company which does not have any exposure to external users, so it would be simpler to use the measurement, recognition, and accounting records. Therefore, PT. TDMN chooses to use SAK ETAP in preparing and presenting financial reports. This study attempts to discuss about the implementation of SAK ETAP in the preparation of financial reports in PT. TDMN. The purpose of the financial reports is to provide the information of financial position, financial performance and cash flow of an entity that is beneficial for a large number of users in making economic decisions by someone who is not in a position to ask for special financial reports to meet specific information needs. Because of the importance of financial reports, the financial reports are prepared in a reasonable and generally acceptable accounting principles in accordance with the actual condition of the company. The study was conducted by evaluating the implementation of SAK ETAP on PT. TDMN by matching the financial reports PT. TDMN with the principles in SAK ETAP. The results of this study indicates that the working practices of financial reports in PT. TDMN are adequate because of the reports is suitable with SAK ETAP.*

**Keywords:** SAK ETAP, Financial Statement

### PENDAHULUAN

Semua perusahaan tentunya menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha tentu berbagai upaya dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara pertanggungjawaban dari suatu perusahaan adalah dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai macam kemudahan. Untuk perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah dapat memilih standar yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan penggunaannya. SAK ETAP mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Oleh sebab itu bagi perusahaan yang telah memutuskan akan menggunakan SAK ETAP sudah harus mengadakan penyesuaian sejak tahun 2010. Penggunaan PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Bagi perusahaan yang sudah memutuskan untuk menggunakan PSAK Umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke SAK ETAP.

PT TDMN merupakan suatu perusahaan UMKM yang tidak memiliki exposure ke pengguna eksternal, sehingga tentu akan lebih sederhana menggunakan pengukuran, pengakuan, dan pencatatan akuntansi. Oleh karena itu PT TDMN memilih menggunakan SAK ETAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT TDMN melakukan penyesuaian dengan SAK ETAP. Dalam pelaporannya PT TDMN telah mencatat seluruh transaksi baik transaksi tunai maupun kredit. Setiap transaksi memiliki bukti transaksi, dan catatan tersendiri untuk aspek-aspek utama laporan keuangan. Selain itu juga membuat daftar rincian yang lebih detil, seperti catatan persediaan bahan baku menurut jenis, pencatatan harta tetap (aset) per satuan barang. Saldo-saldo akhir seluruh catatan tersebut telah dimasukkan ke dalam Neraca dan Laba Rugi.

Sebagaimana diketahui, saat ini PSAK yang diterapkan oleh setiap entitas penyaji laporan keuangan adalah PSAK Umum. PSAK Umum tersebut secara bertahap telah dilakukan perubahan dengan adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga seluruh PSAK merupakan hasil adopsi dari IFRS. Oleh karena itu, pada PT TDMN yang dulunya menerapkan PSAK Umum dan bermaksud akan menerapkan SAK ETAP, harus melakukan perubahan kebijakan akuntansinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana contoh penerapan SAK ETAP dalam perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu PT. TDMN menyelesaikan masalah ketidaklengkapan laporan keuangan perusahaan. Selain itu juga sebagai rujukan untuk mengembangkan kemitraan.

## TINJAUAN PUSTAKA

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1, SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Menurut Belkoui (2006:126), tujuan laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.12, posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur-unsur keuangan menurut Skousen, dkk. (2001:131) meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas.

Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.20, kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Dalam SAK ETAP 2.24, pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dalam SAK ETAP 2.30–2.31, pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu.

Menurut Harahap (2004:77) dasar akrual berarti bahwa dalam menyusun laporan keuangan pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa bukan didasarkan pada transaksi kas. Menurut IAI dalam SAK ETAP 2.33, entitas harus menyusun laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

Pengakuan dalam Laporan Keuangan, menurut IAI dalam SAK ETAP 2.34-2.39:

- a. Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
- c. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- d. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
- e. Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban.

Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.2, laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.4, pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.5, entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimum satu tahun sekali. Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.6-3.8, penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten. Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.10-3.11, pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.

Menurut IAI dalam SAK ETAP 3.12-3.15, Laporan keuangan entitas meliputi: Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut IAI dalam SAK ETAP 4.1-4.4, neraca minimal mencakup pos-pos berikut: Kas dan setara kas, Piutang usaha dan piutang lainnya, Persediaan, Properti investasi, Aset tetap, Aset tidak berwujud, Utang usaha dan utang lainnya, Aset dan kewajiban pajak, Kewajiban diestimasi, dan Ekuitas. Menurut IAI dalam SAK ETAP 4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai SAK ETAP 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Menurut IAI dalam SAK ETAP 4.10-4.11, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. SAK ETAP 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Menurut IAI dalam SAK ETAP 5.3-5.5, Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan, Beban keuangan, Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, Beban pajak, dan Laba atau rugi neto. Menurut IAI dalam SAK ETAP 5.6-5.8, entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Menurut Kieso dkk. (2002:444), persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Menurut Fess, dkk. (2005:440), persediaan digunakan untuk mengindikasikan barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Menurut IAI dalam SAK ETAP 11.3, entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual.

Menurut IAI dalam SAK ETAP 11.4-11.13, biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang. Menurut IAI dalam SAK ETAP 11.14-11.15, entitas harus mengukur biaya persediaan untuk jenis persediaan yang normalnya tidak dapat dipertukarkan, dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu dengan menggunakan identifikasi khusus atas biayanya secara individual. Menurut IAI dalam SAK ETAP 11.17-11.18, jika persediaan dijual, maka jumlah tercatatnya diakui sebagai beban periode dimana pendapatan yang terkait diakui.

Menurut Harahap (2004:20), aset tetap adalah aset yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Menurut IAI dalam SAK ETAP 15.4-15.5, entitas harus menerapkan kriteria pengakuan dalam SAK ETAP 2.24 dalam menentukan pengakuan aset tetap. Menurut Horngren, dkk. (2006:464), harga perolehan aset adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga dapat dipergunakan, nilai bersih dari semua potongan. Menurut IAI dalam SAK ETAP 15.6-15.13, pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Menurut IAI dalam SAK ETAP 15.14-15.16, entitas harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Menurut IAI dalam SAK ETAP 15.17-15.23, beban penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali ada syarat biaya tersebut merupakan bagian biaya perolehan suatu aset.

Menurut IAI dalam SAK ETAP 19.8-19.11, modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Menurut IAI dalam SAK ETAP 20.3-20.4, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Menurut IAI dalam SAK ETAP 24.3-24.4, entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Menurut Mardiasmo (2006:131), cara penghitungan PPh dapat menggunakan pembukuan, dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tanpa hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi penerapan SAK ETAP pada PT TDMN dengan mencocokkan laporan keuangan PT TDMN dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam SAK ETAP. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah catatan dan dokumentasi. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan: (1) Wawancara yang dilakukan berupa tanya jawab dengan pihak yang terkait, yakni auditor eksternal perusahaan yang terlibat dalam penelitian; (2) Dokumentasi, berupa proses pengumpulan data-data berupa dokumen, catatan dan arsip perusahaan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kriteria perusahaan, PT TDMN tidak mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk penerbitan efek di pasar modal Indonesia. PT TDMN tidak menguasai aset dalam kapasitas sebagai kepercayaan untuk penyerahan hak milik sekelompok besar masyarakat. PT TDMN membuat laporan keuangan sesuai dengan standar-standar SAK ETAP. Tujuan laporan keuangan PT TDMN adalah menyediakan informasi posisi keuangan, dan kinerja keuangan entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

PT TDMN telah membuat laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif menurut SAK ETAP sejak tahun 2010. Laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, materialitas, dapat diandalkan, memiliki substansi dan realitas, memiliki pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, seimbang antara biaya dan manfaat. Sesuai SAK ETAP, PT TDMN telah menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut. Manajemen entitas menggunakan SAK ETAP untuk membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang sama. PT TDMN menyajikan dan mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode secara konsisten. Dalam pelaporan keuangan, pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan. PT TDMN hanya membuat laporan keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi.

Informasi yang disajikan dalam Neraca terdiri atas: Kas dan setara kas, Piutang usaha dan piutang lainnya, Persediaan, Aset tetap, Utang usaha dan utang lainnya, Aset dan kewajiban pajak, dan Ekuitas. Informasi yang disajikan

dalam Laporan Laba Rugi terdiri atas: Pendapatan, Beban keuangan, Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, Beban pajak, dan Laba atau rugi neto. PT TDMN mengukur nilai persediaan lebih efisien dengan menggunakan biaya perolehan dikurangi dengan biaya-biaya untuk menjual persediaan, karena jikalau menggunakan harga jual maka laba perusahaan akan meningkat. Rumus biaya yang digunakan PT TDMN adalah masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) untuk seluruh persediaan dengan sifat dan pemakaian yang serupa.

Pos persediaan PT. TDMN telah mencakup:

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
- Total jumlah tercatat persediaan dan klasifikasinya yang tepat dengan entitas;
- Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode;
- Jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laporan laba rugi;
- Jumlah tercatat persediaan yang diagunkan.

Pada saat pengakuan awal aset tetap diukur sebesar biaya perolehan. Seluruh aset tetap setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Entitas juga telah mengakui biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Entitas telah mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. PT TDMN memilih metode penyusutan garis lurus untuk mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa dan akun Tambahan Modal Disetor. Penyajian modal dilakukan sesuai ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku. Saldo laba PT TDMN menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. PT TDMN mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Pendapatan mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan pendapatan, termasuk metode yang diterapkan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi yang melibatkan penyediaan jasa;
- Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk pendapatan yang timbul dari penjualan barang, penyediaan jasa, bunga, royalti, dan dividen.

PT TDMN mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, PT TDMN mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Laporan keuangan PT TDMN sudah memadai karena pelaporannya sudah sesuai dengan SAK ETAP. Tujuan pelaporan keuangan dan karakteristik kualitatif info dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan tersebut telah disusun secara konsisten berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Pelaporan keuangan tidak lengkap, karena hanya membuat Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Penyajian laporan keuangan sudah baik karena sudah dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan hanya periode Januari hingga Agustus 2011 karena dari pihak perusahaan mengalami masalah keterlambatan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan PT TDMN yang tidak lengkap karena laporan keuangan tersebut hanya digunakan untuk pelaporan pajak perusahaan, hal itu menyebabkan tidak dapat diketahui aktivitas operasi dari laporan keuangan masing-masing akun. Adanya keterbatasan data-data yang dapat dipublikasikan oleh PT TDMN. Keterbatasan waktu magang untuk mengamati proses pelaporan keuangan perusahaan dengan lebih baik secara keseluruhan.

Berdasarkan simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah perusahaan seharusnya mengoptimalkan kinerja akuntan perusahaan, sehingga tidak terjadi keterlambatan pembuatan laporan keuangan perusahaan, selain itu PT TDMN dapat mencoba untuk membuat Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan perusahaan.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dr Lodovicus Lasdi, SE, MM selaku pembimbing dari tugas akhir makalah ini.

### REFERENSI

- Belkoui, A.R., 2006, *Teori Akuntansi*, Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat.
- Fess, P.E., J.M. Reeve, dan C.S. Warren, 2005, *Accounting: Pengantar Akuntansi*, Edisi Dua Puluh Satu, Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S.S., 2004, *Akuntansi Aktiva Tetap*, Edisi Kesatu, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, S.S., 2004, *Teori Akuntansi*, Edisi Ketujuh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Horngren, W.T. Horrison, dan L.S. Bamber, 2006, *Akuntansi*, Edisi Keenam, Jakarta: Indeks.

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield, 2002, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, 2006, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Rusjdi, M., 2007, *PPH Pajak Penghasilan*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Indeks.
- Skousen, E.K., Stice, dan J.D. Stice, 2001, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi Ketigabelas, Jakarta: PT. Dian Mas Cemerlang.



B  
I  
N  
U  
S  
A